

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memetakan kesesuaian antara Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Strana KA Indonesia) dengan pedoman tata kelola kecerdasan artifisial yang dipublikasikan ASEAN melalui dokumen *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*. Analisis ini menjadi penting mengingat urgensi harmonisasi kebijakan kecerdasan artifisial lintas negara dalam menghadapi kompleksitas etis, sosial, dan teknis dari perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Isono & Priyadi, 2023). Selain itu, perbedaan kesiapan antar negara ASEAN, sebagaimana ditunjukkan dalam *Government AI Readiness Index* oleh *Oxford Insights* (2024), menciptakan tantangan dalam harmonisasi kebijakan. Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN, namun masih memiliki tantangan dalam pengembangan kapasitas dan mekanisme teknis. Hal ini menuntut kebijakan nasional untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menyelaraskan diri dengan dinamika kebijakan regional.

Stranas KA secara normatif telah mengadopsi sejumlah prinsip yang sejalan dengan *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*, seperti penekanan pada pentingnya etika, pengembangan talenta, keamanan data, dan tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung-jawab. Nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam Stranas KA juga menjadi dasar moral yang serupa dengan prinsip keterlibatan manusia dalam *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*. Meskipun begitu, Stranas KA masih memiliki beberapa kesenjangan dalam penyusunan tata kelola kecerdasan artifisial berdasarkan prinsip-prinsip dan mekanisme *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*. Seperti kurangnya instrumen pengawasan yang konkret, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi risiko dan mekanisme akuntabilitas yang sistematis sebagaimana dianjurkan dalam *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*. Hal ini menjadikan Stranas KA lebih bersifat konseptual dan deklaratif tanpa mempertimbangkan kerangka kerja sistematis dalam pengembangan serta penerapan sistem kecerdasan artifisial (Gasser et al., 2017).

Pendekatan *ASEAN Way* yang menjunjung prinsip fleksibilitas, non-intervensi, dan konsensus politik menjadi kerangka kerja yang mendorong kolaborasi regional, namun juga menyulitkan tercapainya kesepakatan yang mengikat. Oleh karena itu, Stranas KA perlu memperkuat kapasitas kelembagaan nasional dan membuka ruang partisipasi publik untuk memastikan bahwa tata kelola kecerdasan artifisial tidak hanya secara normatif, tetapi juga efektif secara operasional (Velasco, 2023).

## **6.2 Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

### **6.2.1 Saran Akademis**

Diperlukan kajian lebih lanjut yang berfokus pada aspek implementatif kebijakan tata kelola kecerdasan artifisial nasional agar mampu menjabarkan prinsip-prinsip normatif ke dalam langkah teknis yang konkret, terutama pada level institusi dan regulasi. Pendekatan studi komparatif lintas negara ASEAN dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan untuk tata kelola kecerdasan artifisial di Indonesia.

Selain itu, kajian interdisipliner yang melibatkan teknologi, hukum, etika, dan hubungan internasional sangat penting untuk menciptakan kerangka tata kelola kecerdasan artifisial yang komprehensif. Kecerdasan artifisial bukan hanya fenomena teknis, tetapi juga sosial dan politik, sehingga analisis lintas disiplin diperlukan untuk memetakan tantangan-tantangan kontemporer yang bersifat kompleks (Velasco, 2023).

### **6.2.2 Saran Praktis**

Pemerintah Indonesia perlu menyusun panduan teknis turunan dari Stranas KA yang secara eksplisit mencakup penilaian risiko, audit sistem, dan mekanisme pengawasan oleh manusia yang lebih terperinci. Panduan ini harus disusun berdasarkan model teknis sebagaimana diuraikan *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics* sebagai salah satu panduan dalam tata kelola kecerdasan artifisial skala regional.

Sinergitas antar lembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus diperkuat dalam proses pembuatan kebijakan kecerdasan artifisial. Terlebih memberikan diskursus kepada masyarakat sipil untuk memberikan kesadaran akan keterlibatan dan keterbatasan kecerdasan artifisial dalam kehidupan bersosial masyarakat. Hal ini perlu dirancang untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan serta mengurangi risiko bias dalam pengambilan keputusan otomatis (Grau & Hankins, 2023). Selain itu, edukasi publik mengenai prinsip dan etika kecerdasan artifisial, hak digital, dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial perlu ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat, untuk membangun ekosistem kecerdasan artifisial yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Ashok et al., 2022).

Indonesia memiliki kawasan dan posisi strategis untuk mengambil peran dalam penyusunan standar tata kelola kecerdasan artifisial di ASEAN. dengan mengembangkan Stranas KA sebagai kebijakan kecerdasan artifisial berbasis nilai lokal dan sejalan dengan prinsip regional, Indonesia dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan kecerdasan artifisial inklusif di Asia Tenggara.